2020

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK) SEMESTER II TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

Pengadilan Negeri Makassar
Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : 0411 - 3624058
Faximile : 0411 - 3634667
Email : info@pn-makassar.go.id
Website : www.pn-makassar.go.id

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

SEMESTER II

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 3
BAB II 5
METODOLOGI 5
2.1. Metode Penelitian 5
2.2. Populasi Dan Sampel 5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 6
2.5. Teknik Analisis Data 6
2.6. Tahapan pelaksanaan 7
BAB III 9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 9
3.1. Profil responden 9
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator 13
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 24
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 25
BAB IV 29
PENUTUP 29
4.1. Kesimpulan 29
4.2. Rekomendasi 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner.
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data untuk kemudian dipersilahkan mengisi survey pada pc yang telah disediakan di meja PTSP

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar

didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner online yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 150 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas memiliki latar Sarjana.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Diploma (D1/D2/D3/D4)	0	0
2	Pasca Sarjana S2	27	18
3	Sarjana S1	100	66,67
4	SD	0	0
5	SMA/SMU/SMK/STM	20	13,33
6	SMP	0	0
7	Tidak Sekolah	0	0
8	Tidak mencantumkan Pendidikan	3	2
Jumlah		150	100

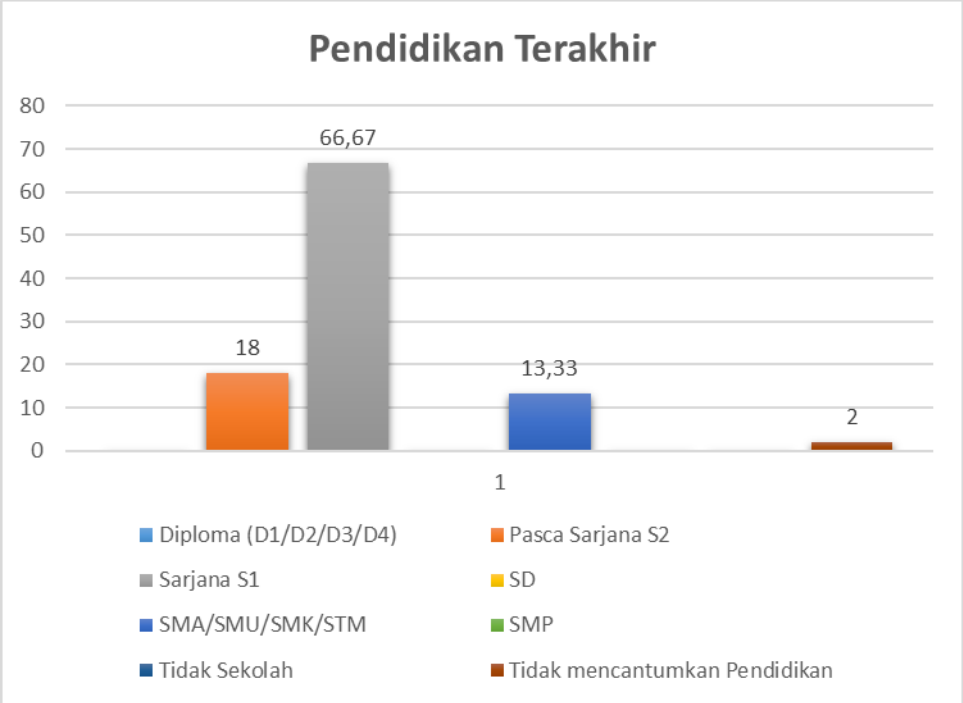

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 53,7% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mememiliki pekerjaan sebagai Pengacara/Jaksa/Notaris yang bekerja di bidang Hukum.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Pegawai Swasta	7	4,8
2	Pelajar / Mahasiswa	2	1,4
3	Pengacara/Jaksa/Notaris	79	53,7
4	Petani/Nelayan/Pedagang	0	0
5	PNS	20	13,6
6	TNI/Polri	21	14,3
7	Wiraswasta	16	10,9
8	Lainnya	2	1,4
9	Tidak Mengisi	0	0
Jumlah		150	100

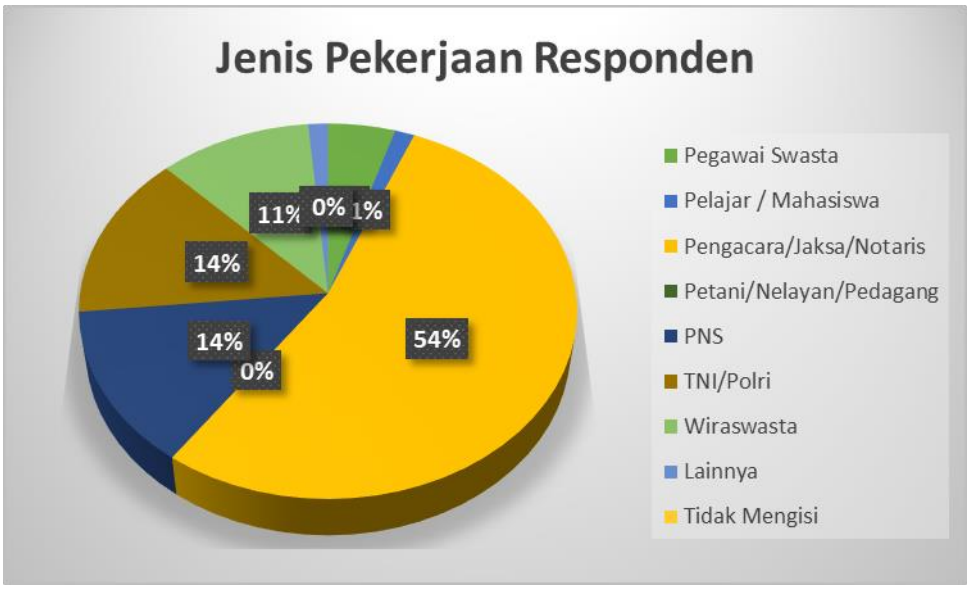

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari Kecamatan Rappocini dengan 15,4% yang mungkin beranggapan bahkwa kota Makassar.

Tabel 6

Domisili Responden

No	Domisili	Frekuensi	%
1	Biring Kanaya	8	5,6
2	Bontoala	2	1,4
3	Luar Makassar	18	12,6
4	Makassar	14	9,8
5	Mamajang	5	3,5
6	Manggala	13	9,1
7	Mariso	4	2,8
8	Panakkukang	19	13,3
9	Rappocini	22	15,4
10	Tallo	9	6,3
11	Tamalanrea	6	4,2
12	Tamalate	14	9,8
13	Ujung Pandang	5	3,5
14	Ujung Tanah	1	0,7
15	Wajoo	3	2,1
16	Tidak Mengisi	0	0,7
Jumlah		150	100

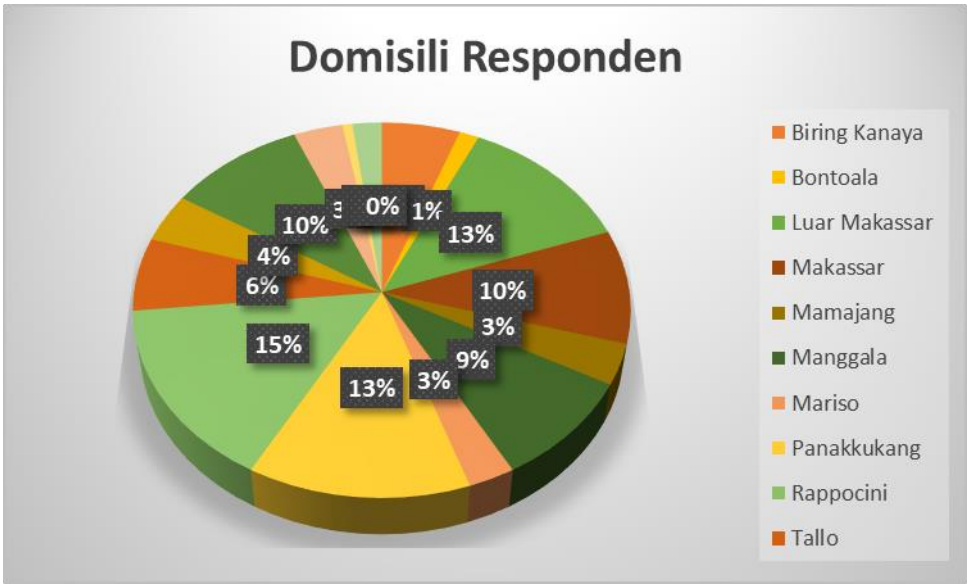

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 35 tahun s/d 54 tahun. Bagi kelompok usia di atas 54 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.

Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	19-34	72	49,3
2	35-54	64	43,8
3	>54	10	6,8
6	Tidak mencantumkan usia	0	0
Jumlah		150	100

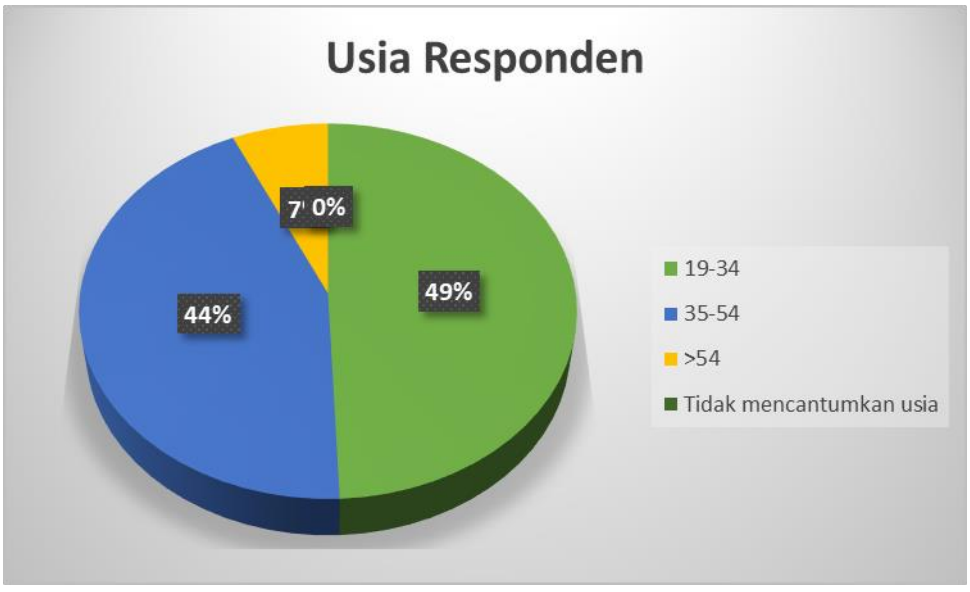

3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar

31,5% akibat banyaknya pengunjung sidang di setiap persidangan.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	27	18,5
2	Perdata Gugatan	27	18,5
3	Perdata Permohonan/Penetapan	0	0
4	Tipikor	12	8,2
5	Niaga	11	7,5
6	PHI	10	6,8
7	Persidangan	32	21,9
8	Pengesahan	9	6,2
9	Surat Keterangan	32	21,9
10	Layanan Hukum	46	31,5
11	Lain - Lain	6	4,1
Jumlah		150	100

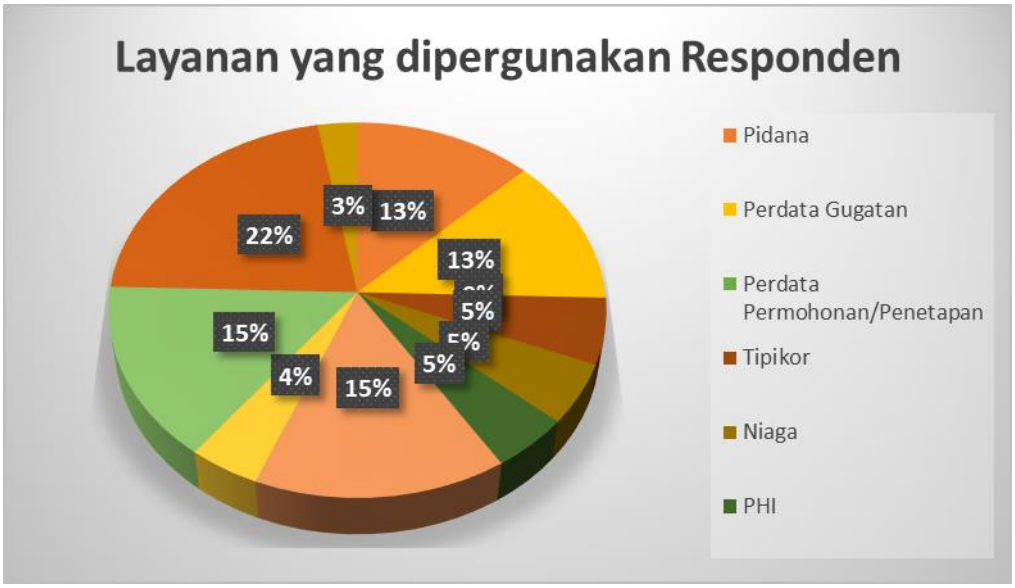

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,83** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari presepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	0	0	0
3	Jarang	11	7,33	33
4	Tidak ada	135	90	540
0	Tidak Mengisi	3	2	
Jumlah		**150**	**100**	**574**
	NRR Tertimbang			**3,83**

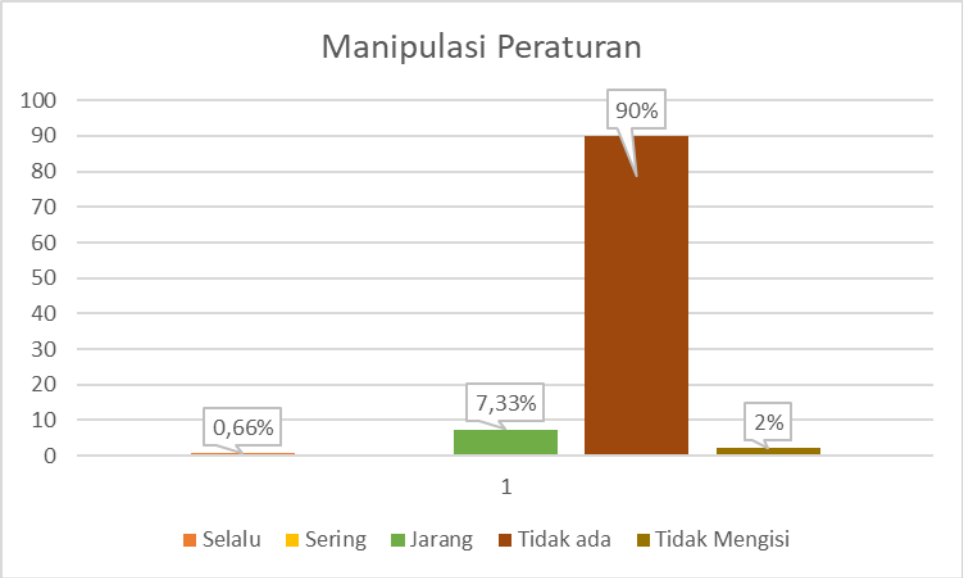

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,88**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	9	6	27
4	Tidak ada	138	92	552
0	Tidak Mengisi	1	0,66	
Jumlah		**150**	**100**	**582**
	NRR Tertimbang			**3,88**

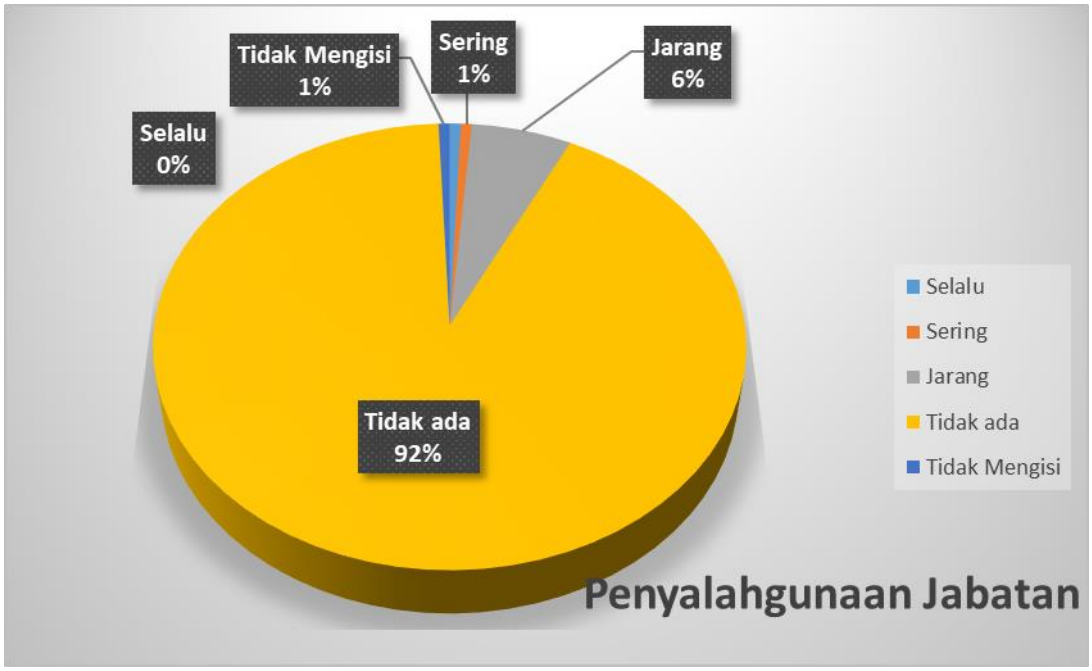

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,83**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	0	0	0
3	Jarang	7	4,67	21
4	Tidak ada	138	92	552
0	Tidak Mengisi	4	2,67	
Jumlah		**150**	**100**	**574**
	NRR Tertimbang			**3,83**

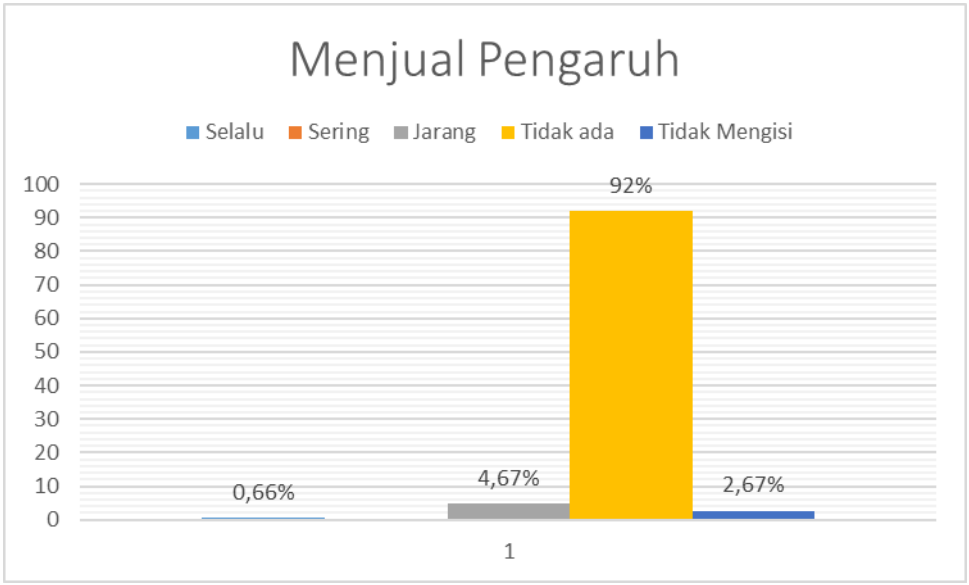

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,88**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan publik dengan transparansi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Transparansi Biaya	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	0	0	0
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	9	6	27
4	Tidak ada	137	92	548
0	Tidak Mengisi	3	2	
Jumlah		**150**	**100**	**577**
	NRR Tertimbang			**3,8866**

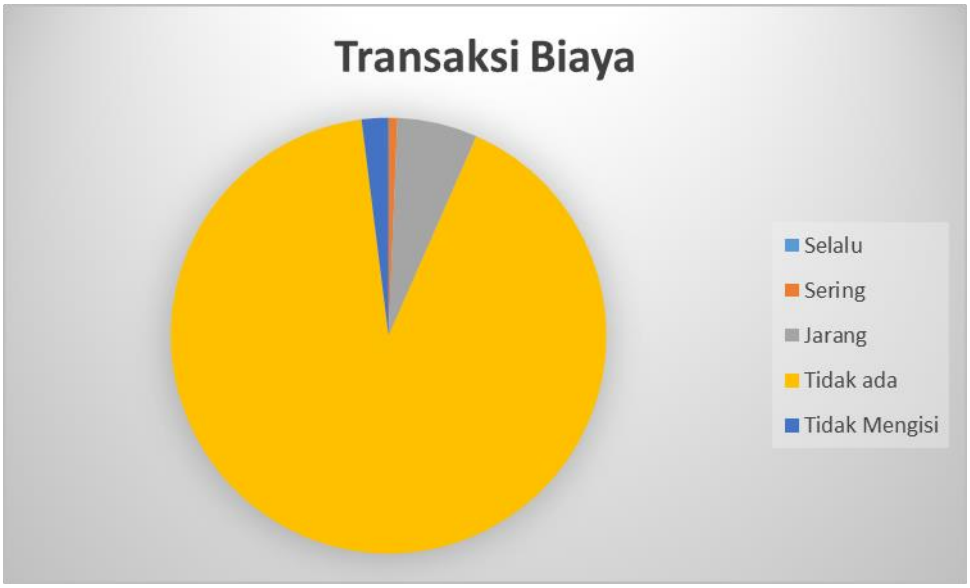

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,90**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No	Biaya Tambahan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	6	4	12
4	Tidak ada	141	94	564
0	Tidak Mengisi	1	0,66	
Jumlah		**150**	**100**	**585**
	NRR Tertimbang			**3,90**

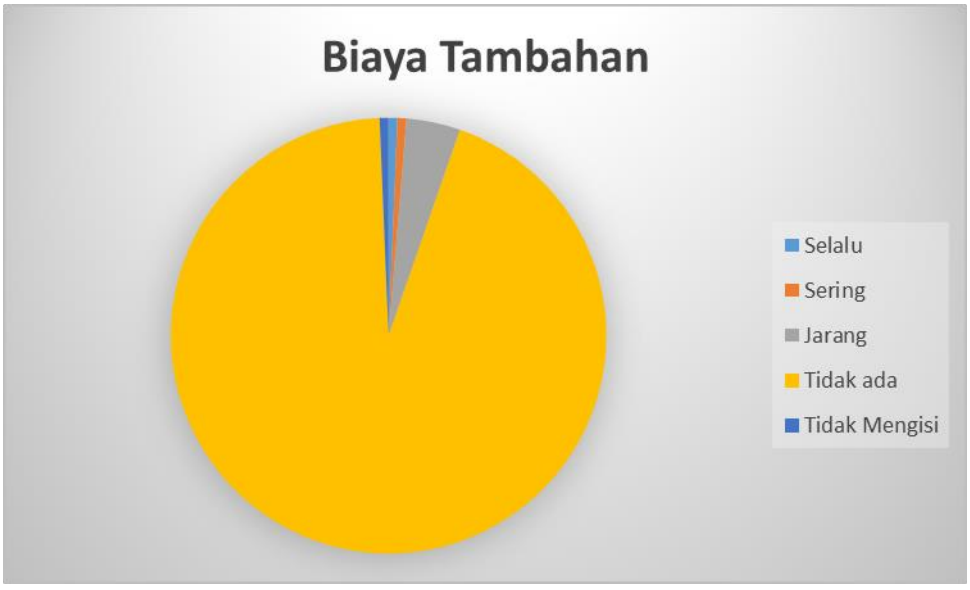

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,91.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apaapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

No	Hadiah	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	1	0,66	1
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	4	5,33	12
4	Tidak ada	143	92,67	572
0	Tidak Mengisi	1	0,66	
Jumlah		**150**	**100**	**587**
	NRR Tertimbang			**3,91**

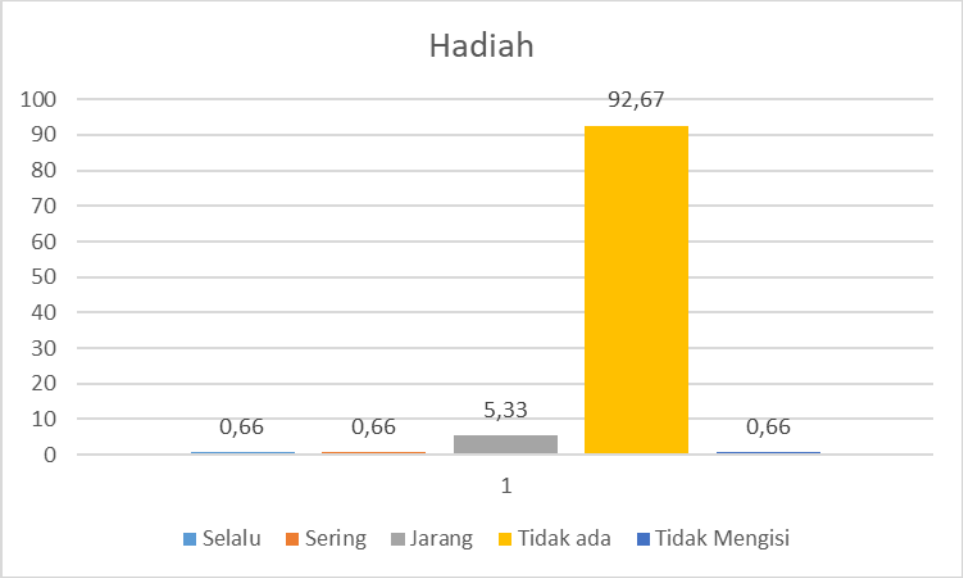

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,85** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap pembayaran sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No	Transparasi Biaya	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	0	0	0
2	Sering	1	0,66	2
3	Jarang	7	4,66	21
4	Tidak ada	139	93,33	556
0	Tidak Mengisi	3	2	
Jumlah		**150**	**100**	**577**
	NRR Tertimbang			**3,85**

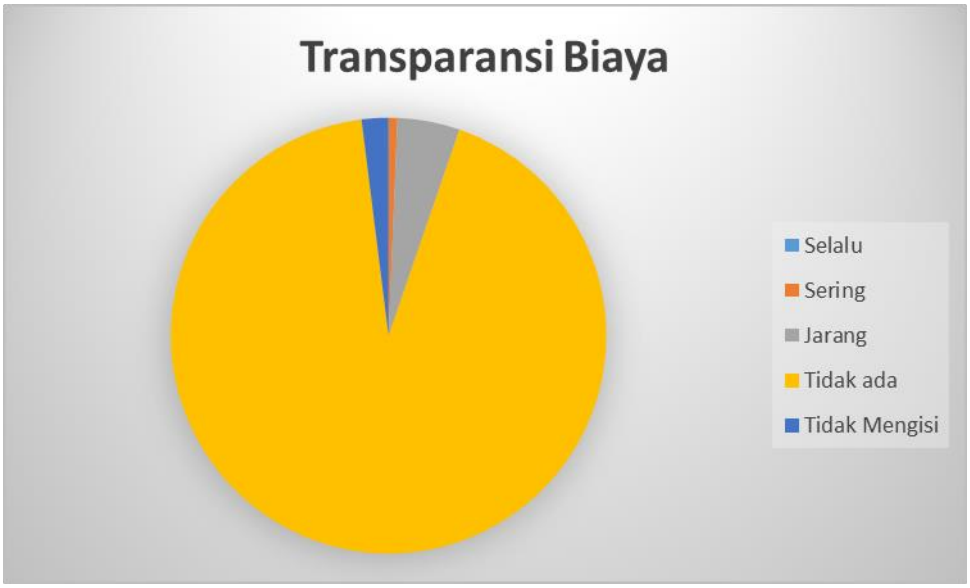

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,81.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengurusan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	2	1,33	4
3	Jarang	3	2	9
4	Tidak ada	139	92,66	556
0	Tidak Mengisi	4	2,66	
Jumlah		**150**	**100**	**571**
	NRR Tertimbang			**3,81**

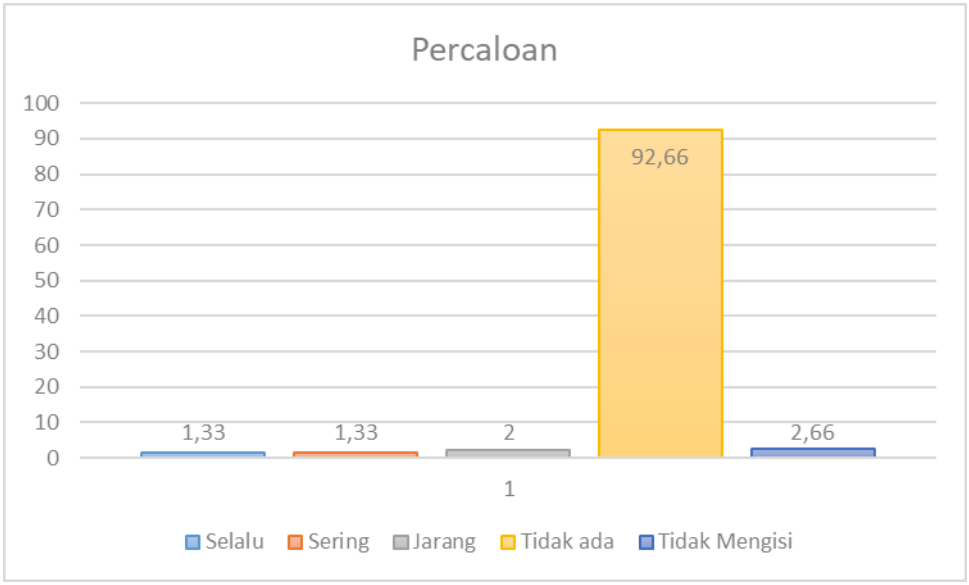

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,80**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari perbuatan curang.

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Perbuatan Curang	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	2	1,33	2
2	Sering	4	2,66	8
3	Jarang	8	5,33	24
4	Tidak ada	134	89,33	536
0	Tidak Mengisi	2	1,33	
Jumlah		**150**	**100**	**570**
	NRR Tertimbang			**3,80**

3.2.1. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,90

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan meyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Transaksi Rahasia	Frekuensi	%	NRR
1	Selalu	0	0	0
2	Sering	0	0	0
3	Jarang	7	4,66	21
4	Tidak ada	141	94	564
0	Tidak Mengisi	2		
Jumlah		**150**	**100**	**585**
	NRR Tertimbang			**3,90**

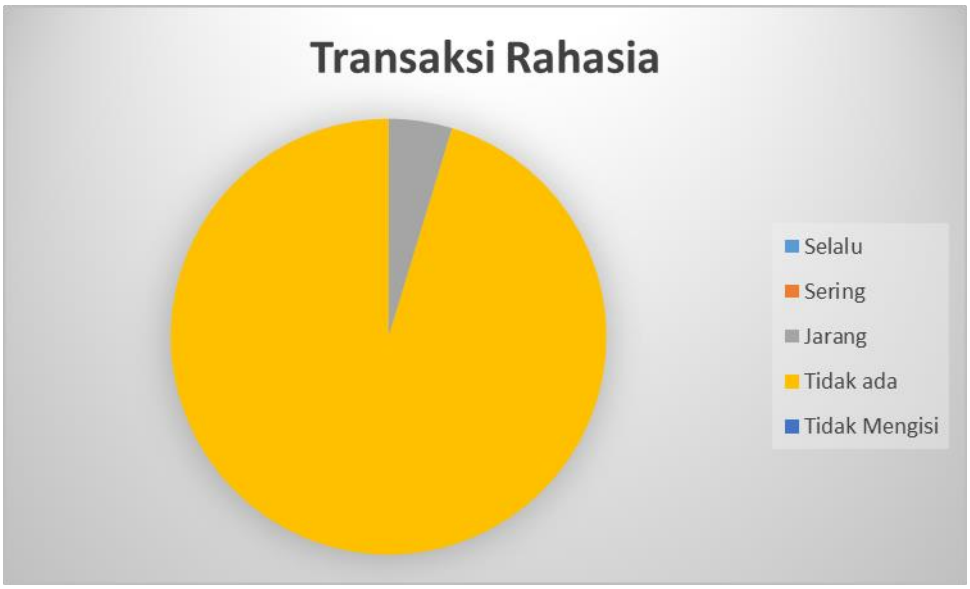

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar **38,56.**

Tabel 19.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	**3,83**
U2	Penyalahgunaan Jabatan	**3,88**
U3	Menjual Pengaruh	**3,83**
U4	Transparansi Biaya	**3,85**
U5	Biaya Tambahan	**3,90**
U6	Hadiah	**3,91**
U7	Transparansi Biaya	**3,85**
U8	Percaloan	**3,81**
U9	Perbuatan Curang	**3,80**
U10	Transaksi Rahasia	**3,90**
	Total	38,56
	Rata Rata	3,85

Indeks **3,85** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka **4.**

Tabel 20.

Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

pada pengadilan Negeri Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada pengadilan

NO	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Semoga kedepannya pelayanan Pengadilan Negeri Makassar bisa lebih dikembangkan lagi
2	Pelayanan lebih ditingkatkan
3	Tambahkan kursi pengunjung
4	Selalu kedepankan prosedur
5	Pelayanan sudah bagus sekali tinggal mempertahankan saja atau perlu di tingkatkan lagi...
6	Tidak ada kritik dan saran semua pelayanan sdh sangat bagus
7	pelayanan dapat lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan informasi
8	Terus meningkatkan pelayanan dan inovasi kearah yang lebih baik agar tetap terwujud peradilan dengan predikat wilayah bebas korupsi
9	Tetap semangat dalam memberantas korupsi, jangan memandang bulu dalam mengadili yah.
10	Perbanyak sosialisasi ke media sosial terkait kemajuan pelayanan di lingkungan pengadilan.
11	Tetap meningkatkan kinerja sesuai standar kerja dan hukum yang berlaku
12	Pelayanan di pengadilan negeri Makassar sudah sangat bagus

13	Tetap bersyukur dengan apa yg dimiliki
14	Tolong jadwal dan jam sidang dimulai sesuai jam atau jadwal yang telah ditentukan
15	Pelayanan di PN Makassar sudah sangat baik, pegawainya juga ramah dan memberikan pelayanan prima. Semoga ini bisa dipertahankan dan tetap ditingkatkan🙏
16	Perlu tambahan waktu pelayanan
17	Tolong jadwal dan jam sidang dimulai sesuai jam atau jadwal yang telah ditentukan
18	tibgkatkan pelayanan mandiri
19	pelayanan sudah bagus tetap di pertahankan
20	Sudah baik harap di pertahankan dan ditingkatkan
21	semoga performa dan pelayanan menjadi semakin baik,tetap dijaga agar akuntabel,transparan dan tetap keren agar dapat menjadi role model di wilayah Pengadilan tinggi sulawesi selatan...
22	Tetap menjaga integritas dan citra PN.Makassar sebagai Lembaga Peradilan Kelas IA Khusus dan sebagai Lembaga Peradilan percontohan utk Lembaga Peradilan lainnya, Salam Sehat dan Sukses Selalu, Terima Kasih.
23	Bekerja tulus iklas dan kejujuran yg utama insya Allah Tuhan akan membertiNya. , karena di pengadilan bukan tempat mencari menang kalah melainkan mencari keadilan yg hakiki.
24	Sehat Dan sukses selalu untuk Kita semua .amin
25	Diharapkan pegawai /karyawan PN bekerja secara profesional jangan memanfaatkan pencari keadilan yg tersesat.

26	Perbuatan corup akan selesai jikalau SDH ada kejujuran.
27	Agar kursi tampah untuk ruang tunggu
28	Jangan menerima pemberian skalipun dikasi cuma2 krn itu menjadi pintu percaloan yg berujung korupsi
29	Tetap pertahankan pelayanan yang baik...
30	Gaji setiap satuan kerja diperhatikan agar memenuhi kebutuhan kehidupan setiap anggota pengadilan, lalu kesadaraan memegang Amanah dari manusia dan Yang Muada bahwa setiap anggota yg bekerja dapat dipertanggun jwabkan dunia akhirat dan menjadi kebanggan karena menjadi penentu kebenaran dan kesdilan dan menjadi perwalian keadalan di dunia
31	Baik
32	sudah baik
33	bagus

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,85 atau** masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,83;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,88;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,83;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,85;
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,90;
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,90;
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,91;
8. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,85;
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,81;
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,80;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar .Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,81 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Pecaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Demikian Laporan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi ini

kami buat sekiranya dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan lagi Indeks Persepsi Anti Korupsi dan dapat mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar bebas dari korupsi. Amin.

Makassar, 31 Desember 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

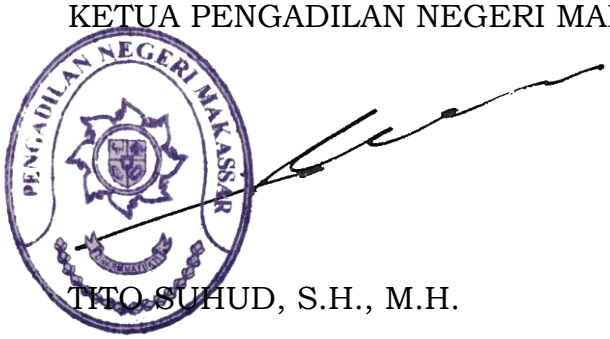

TITO SUHUD, S.H., M.H.
NIP. 196407211992121001

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TAHUN 2020

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : .....(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : .....
3. Umur (Tahun) : .....
4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Domisili Kecamatan : .....
6. Pendidikan terkahir : 1. Tidak sekolah
   2. SD
   3. SMP/SLTP
   4. SLTA
   5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
   6. Sarjana (S1)
   7. Pasca Sarjana (S2/S3)
7. Pekerjaan Utama :
   1. PNS
   2. TNI/Polri
   3. Pegawai Swasta
   4. Wiraswasta
   5. Petani/Nelayan/Pedagang
   6. Pengacara/Jaksa/Notaris
   7. Pelajar / Mahasiswa
   8. Lainnya.....
8. Layanan yg digunakan :
   1. Pidana
   2. Pdt Gugatan
   3. Pdt Permohonan
   4. Tipikor
   5. Niaga
   6. PHI.
   7. Persidangan
   8. Pengesahan
   9. Surat Keterangan
   10. Lainnya.....
   .....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
   Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		**Selalu**	**Sering**	**Jarang**	**Tidak ada**	**Kode Pengolahan**
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu? **(Manipulasi Peraturan)**	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan dengan ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? **(Penyalahgunaan Jabatan)**	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? **(Menjual Pengaruh)**	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu susah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (**Transaksi Biaya**)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar tidak sesuai tarif resmi dan ada biaya tambahan? **(Biaya Tambahan)**	1	2	3	4	
6.	Apakah anda memberi tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? **(Hadiah)**	1	2	3	4	
7.	Tidak merima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? **(Transparasi Biaya)**	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? **(Percaloan)**	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? **(Perbuatan Curang)**	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan ? **(Transaksi Rahasia)**	1	2	3	4	

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan terhadap persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar:

……
……
……
……
……
……
……

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan terhadap persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar:

……
……
……
……
……
……
……

PETUGAS PELAKSANA :

1. **Petugas :**
   - Nama :.....
   - Tanda Tangan :.....
   - Tanggal Pelaksana : .....

2. **Pencacah/Penghitung hasil survei :**
   - Nama : .....
   - Tanda Tangan : .....
   - Tanggal Pelaksana : .....

3. **Pengawas/Pemeriksa :**
   - Nama : .....
   - Tanda Tangan : .....
   - Tanggal Pelaksana : .....